

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta,
- Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sadu Wasistiono, Esensi UU No.22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Bunga Rampai, Jatinangor: Alqaprint, 2001.
- Soemitro dalam Soejono & Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA. Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang -Undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pariwisata.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin gangguan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pariwisata.

C. Jurnal

- Gandaria, R. Y., 2015, "Implentas Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No.6
- Lubis, M., 2018, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembagunan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1

